

# Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015: Versi Rangkuman







## Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015

*Copyright @ 2015*

*Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dan World Food Programme (WFP)*

*Hak Cipta dilindungi. Dilarang memproduksi ulang atau menyebarkan publikasi ini dalam bentuk atau tujuan apapun tanpa izin.*

*Diterbitkan oleh: Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dan World Food Programme (WFP)*

*Materi yang digunakan dan digambarkan pada peta di dalam laporan ini tidak menyiratkan dukungan atau pengakuan resmi dari WFP mengenai status hukum atau konstitusi negara, wilayah darat atau laut, atau berkaitan dengan penetapan batas negara.*

# Kemajuan Substansial dalam Pencapaian MDGs

Indonesia telah mencapai Tujuan Pembangunan Milenium yang pertama yaitu mengurangi setengah dari jumlah penduduk yang hidup dalam kelaparan dan kemiskinan ekstrim. Pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah memprioritaskan program pangan dan gizi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Untuk mendukung Indonesia mencapai tujuan-tujuan pembangunan tersebut, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2015 (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*) telah mengidentifikasi kabupaten-kabupaten yang paling rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi, dan apa yang menjadi penyebab kerentanannya. Dokumen ini merupakan alat yang sangat baik untuk memastikan bahwa kebijakan dan sumber daya yang dikeluarkan dapat memberikan dampak yang maksimal.

Sejak peta pertama diluncurkan pada tahun 2005 dan edisi kedua pada tahun 2009, telah terjadi peningkatan signifikan pada aspek ketersediaan pangan di tingkat nasional. Kemiskinan telah berkurang sehingga meningkatkan akses terhadap pangan. Saat ini lebih banyak rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan dan angka harapan hidup mereka juga meningkat. Listrik dan jalan telah menjangkau wilayah yang lebih luas.

## Tinjauan Umum Tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Di Indonesia, UU No. 18 tahun 2012 mendefinisikan Ketahanan Pangan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

FSVA menggunakan 13 indikator yang tersedia di tingkat kabupaten yang mampu mengukur berbagai aspek ketahanan pangan dan gizi. FSVA membagi indikator-indikator tersebut menjadi dua kelompok indikator: kerawanan pangan dan gizi kronis serta kerawanan pangan transien. Indikator transien menjelaskan faktor iklim dan lingkungan yang mempengaruhi kerawanan pangan dari aspek ketersediaan dan akses pangan. Sedangkan kerawanan pangan kronis, indikator untuk mengukur ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Sembilan indikator yang terkait dengan kerawanan pangan kronis kemudian digabungkan menjadi satu indikator komposit untuk menjelaskan secara keseluruhan kondisi ketahanan pangan suatu kabupaten serta memberi peringkat atas tingkat prioritas dari masing-masing kabupaten.

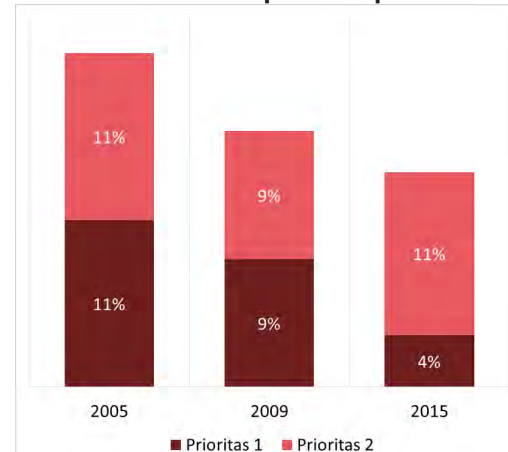
## Ketahanan Pangan Meningkat Namun Beberapa Daerah Masih Tertinggal

Sejak tahun 2005, terjadi penurunan jumlah kabupaten yang paling rentan pangan yang di klasifikasikan sebagai Prioritas 1 dan 2. Secara umum, ketahanan pangan sebagian besar masyarakat Indonesia telah meningkat pada periode 2009 dan 2015. Hal ini, terutama sebagai dampak dari perbaikan pada beberapa indikator ketahanan pangan dan gizi. Hasil ini menggembirakan, namun kemajuan tersebut dapat mengalami hambatan jika tantangan-tantangan utama yang ada tidak ditangani dengan baik.

Berikut merupakan tiga tantangan utama yang memerlukan perhatian yang serius:

- I. Meningkatkan akses ekonomi atau akses keuangan untuk mendapatkan pangan, termasuk investasi pada infrastruktur yang berkelanjutan;
- II. Akselerasi intervensi untuk pencegahan dan penurunan angka kekurangan gizi; dan
- III. Mengatasi kerentanan terhadap resiko perubahan iklim yang semakin meningkat.

Penurunan Jumlah Kabupaten Berprioritas Tinggi



# Tantangan-Tantangan Utama

## Meningkatkan akses ekonomi atau akses keuangan untuk mendapatkan pangan, termasuk melalui peningkatan investasi berkelanjutan pada infrastruktur

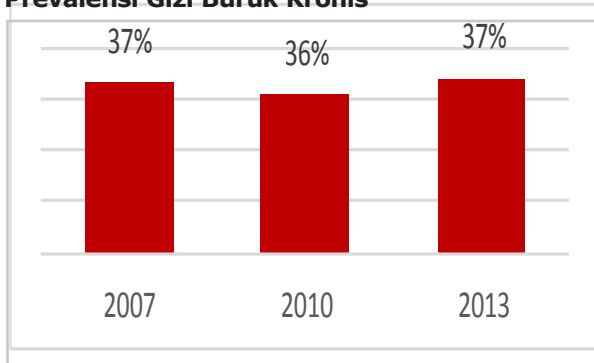
Indonesia telah membuat pencapaian yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan dari segi jumlah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 masih sangat tinggi yaitu sebesar 27,7 juta orang. Tantangan lainnya yang perlu menjadi perhatian juga adalah kesenjangan pendapatan masyarakat yang semakin tinggi terlihat dari meningkatnya koefisien gini pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,41 atau meningkat sebesar 14 persen dari 2007.

Meskipun perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan dengan cepat, namun baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Kombinasi antara melambatnya pertumbuhan ekonomi dan semakin tingginya kesenjangan pendapatan dapat menyebabkan masyarakat miskin akan tetap beresiko rentan terhadap rawan pangan.

## Akselerasi pencegahan dan intervensi gizi buruk

Meskipun telah terjadi perbaikan keseluruhan situasi ketahanan pangan dan gizi, tetapi terlihat jelas pada data-data yang ada bahwa ketahanan gizi masih jauh tertinggal. Bahkan, pencapaian pada beberapa tujuan MDGs terkait kesehatan dan gizi kurang mengalami kemajuan, seperti meningkatnya persentase balita *stunting* pada tahun 2010-2013; meningkatnya kematian ibu melahirkan; dan jumlah angka kematian bayi yang relatif masih tinggi. Selain itu, pencapaian Indonesia untuk target MDGs dalam hal *higiene* (kebersihan) masih memerlukan perhatian serius, mengingat bahwa status kesehatan yang buruk dan kekurangan gizi akan membentuk lingkaran setan.

**Prevalensi Gizi Buruk Kronis**



Permasalahan kekurangan gizi di Indonesia bukan hanya permasalahan penduduk miskin saja, hal ini dapat terlihat dari proporsi anak-anak Indonesia yang *stunting* hampir empat kali lebih besar dari proporsi penduduk miskin. Untuk penduduk tidak-miskin tetapi mengalami kurang gizi, hambatan untuk mencapai status gizi yang lebih baik belum tentu terkait pada akses ekonomi atau program pengentasan kemiskinan pemerintah, akan tetapi berkaitan dengan kurangnya pemahaman terhadap praktek pola makan dan gizi yang baik. Sebaliknya, untuk penduduk miskin yang mengalami kurang gizi akan menghadapi tambahan permasalahan akses ekonomi dan sosial.

## Mengatasi kerentanan terhadap resiko perubahan iklim yang semakin meningkat

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan terhadap bencana di dunia, dimana bencana alam merupakan faktor utama kerawanan pangan transien di Indonesia. Berdasarkan penelitian dari *Center for Research on the Epidemiology of Disasters* (CRED), terdapat enam negara (Indonesia, Cina, Amerika Serikat, Filipina, Afghanistan dan India) yang paling sering mengalami bencana alam pada 2012 dan 2013.

Bencana alam, deforestasi hutan dan perubahan iklim memiliki potensi dampak yang besar terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Terjadinya kejadian iklim ekstrim yang menyebabkan hilangnya produksi tanaman pangan dalam jumlah yang signifikan sebagian besar berkaitan dengan fenomena El *Niño/Southern Oscillation* (ENSO). Peningkatan suhu permukaan laut sebesar satu derajat celsius diduga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap curah hujan di provinsi Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur bagian barat, dan sebagian besar Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah.

Variabilitas curah hujan cenderung merugikan pertanian berkelanjutan kecuali telah tersedianya sistem penyimpanan air (waduk dan dam) dan sistem irigasi yang memadai. Analisis mengenai dampak perubahan iklim terhadap produksi padi di Jawa menunjukkan bahwa produksi padi pada tahun 2025 dan 2050, masing-masing akan berkurang sebesar 1,8 juta ton dan 3,6 juta ton dibandingkan tingkat produksi padi saat ini.

Moratorium deforestasi hutan sejak awal tahun 2011 telah berperan dalam menurunkan laju deforestasi, akan tetapi laju deforestasi hutan relatif masih tinggi.

# Rekomendasi

## Akses Ekonomi

Dengan jumlah penduduk miskin 27,7 juta orang dan beberapa juta penduduk lainnya yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan, maka program bantuan sosial dan jaring pengaman sosial menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung rumah tangga miskin dalam mendapatkan akses pangan yang memadai dalam jangka pendek, sementara program jangka panjang seperti penguatan dan diversifikasi mata pencaharian serta perluasan infrastruktur dan pelayanan dasar perlu segera di implementasikan. Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia membelanjakan sekitar 0,75 persen dari Produk Domestik Bruto untuk program bantuan sosial, namun alokasi tersebut masih berada di bawah rata-rata regional dan rata-rata negara-negara berpenghasilan menengah. Peningkatan alokasi anggaran untuk program bantuan sosial yang dikombinasikan dengan inovasi baru untuk meningkatkan efektivitas dan sensitivitas gizi, sehingga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap akses pangan.

## Gizi

Pendekatan multi-sektoral untuk mengurangi dan mencegah kekurangan gizi di Indonesia sangat penting dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga PBB, masyarakat sipil serta sektor swasta. Untuk lembaga pemerintah, koordinasi lintas sektor sangat perlu ditingkatkan guna mengatasi hambatan kelembagaan dalam pembuatan kebijakan dan program pemerintah, dimana dapat memperbaiki sensitivitas gizi dari program kesejahteraan, pertanian dan atau program perubahan iklim yang ada. Mengingat singkatnya waktu "jendela peluang 1000 hari pertama kehidupan" untuk intervensi, perbaikan dalam hal kualitas dan waktu pengumpulan data status gizi akan meningkatkan kemampuan seluruh sektor untuk memberikan intervensi.

***"Permasalahan malnutrisi terus menghambat potensi Indonesia, dimana lebih dari sepertiga balita di Indonesia berbadan pendek (stunting), namun pada saat yang sama, terjadi peningkatan jumlah orang dewasa yang mengalami kelebihan berat badan lebih atau obesitas, yang oleh para ahli gizi disebut sebagai "Beban-Ganda" malnutrisi.***

Program jaring pengaman sosial dapat menjadi program utama untuk meningkatkan **outcome** gizi. Program bantuan sosial terbesar di Indonesia sekarang ini adalah Raskin. Raskin merupakan program beras bersubsidi untuk rumah tangga miskin yang berperan sebagai transfer pendapatan dengan menggunakan bahan pangan sebagai modalitas utamanya. Namun, dengan adanya pergeseran penyediaan beras terfortifikasi, maka Raskin merupakan cara yang hemat biaya untuk meningkatkan asupan zat gizi mikro bagi keluarga berpenghasilan rendah. Hal ini mendorong Pemerintah untuk membuat percontohan fortifikasi beras yang sedang berlangsung saat ini.

## Perubahan Iklim

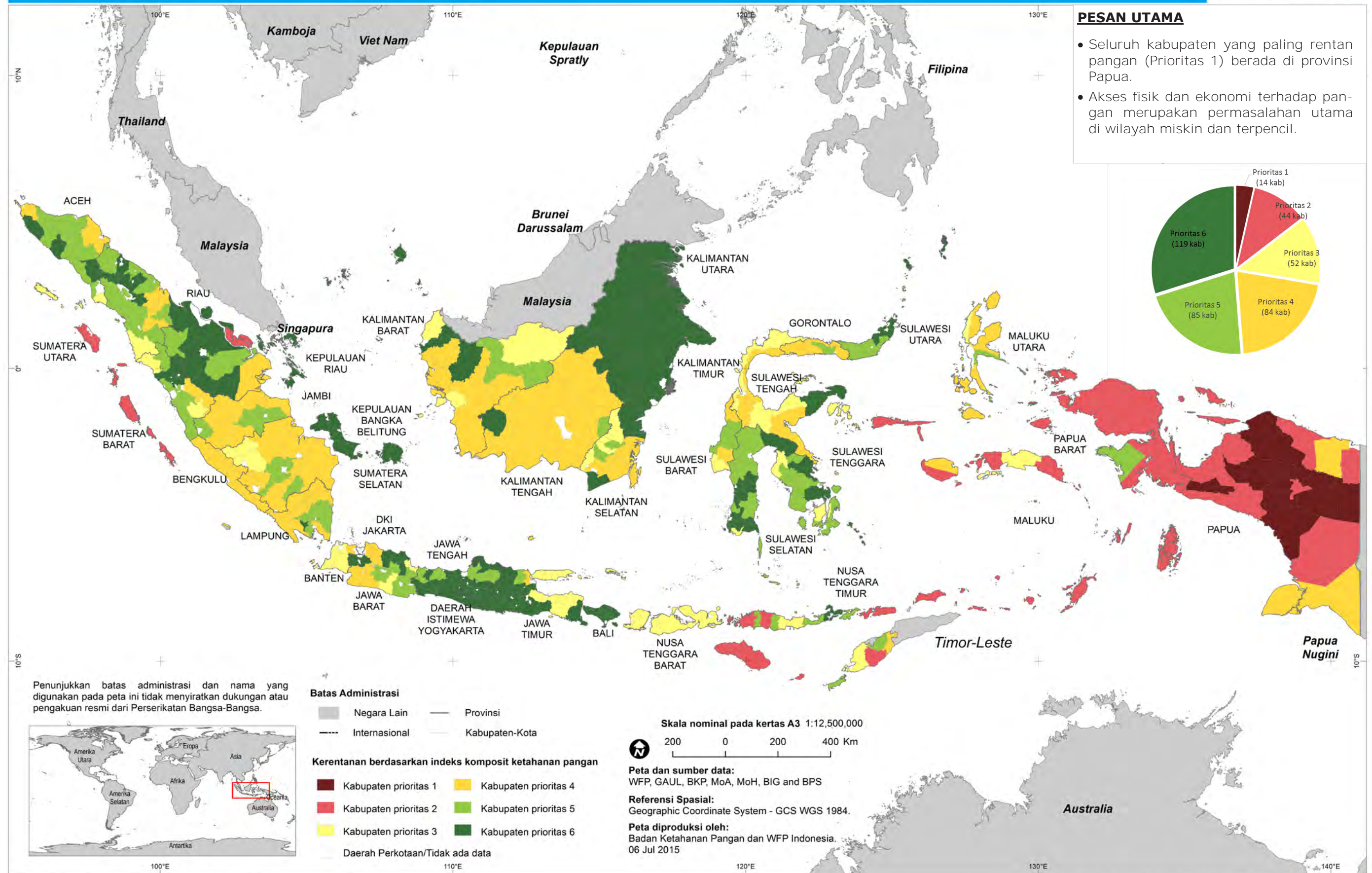
Keberlanjutan pasokan air dan jasa lingkungan lainnya merupakan hal penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Pengelolaan air dapat diperkuat melalui peningkatan perencanaan tata ruang dan sistem penggunaan lahan, pengelolaan konservasi dan kawasan ekosistem esensial, rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi, dan percepatan pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pertanian (termasuk irigasi, bendungan dan waduk) dengan menggunakan teknologi iklim yang baru dan tangguh. Peluang lainnya termasuk meningkatkan sistem peringatan dini untuk bencana yang terprediksi (**slow-onset**) dan mendadak (**sudden-onset**) terkait dengan perubahan iklim, menciptakan program insentif untuk penelitian dan pengembangan daya tahan tanaman terhadap kondisi iklim dan hama tanaman yang baru.

## Kesimpulan

Mengingat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan kapasitas kelembagaan yang besar, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi pada beberapa tahun mendatang. Hal ini membutuhkan program-program pemerintah yang lebih fokus pada pengurangan kemiskinan, program gizi-sensitif, diversifikasi pangan dan strategi adaptasi iklim. Melalui peningkatan komunikasi dan koordinasi lintas sektor, serta lebih banyak upaya untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan upaya sektor publik dan swasta, Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, pendapatan yang merata dan tahan terhadap dampak yang disebabkan oleh bencana alam dan bencana lainnya.



# Kerentanan terhadap kerawanan pangan 2015



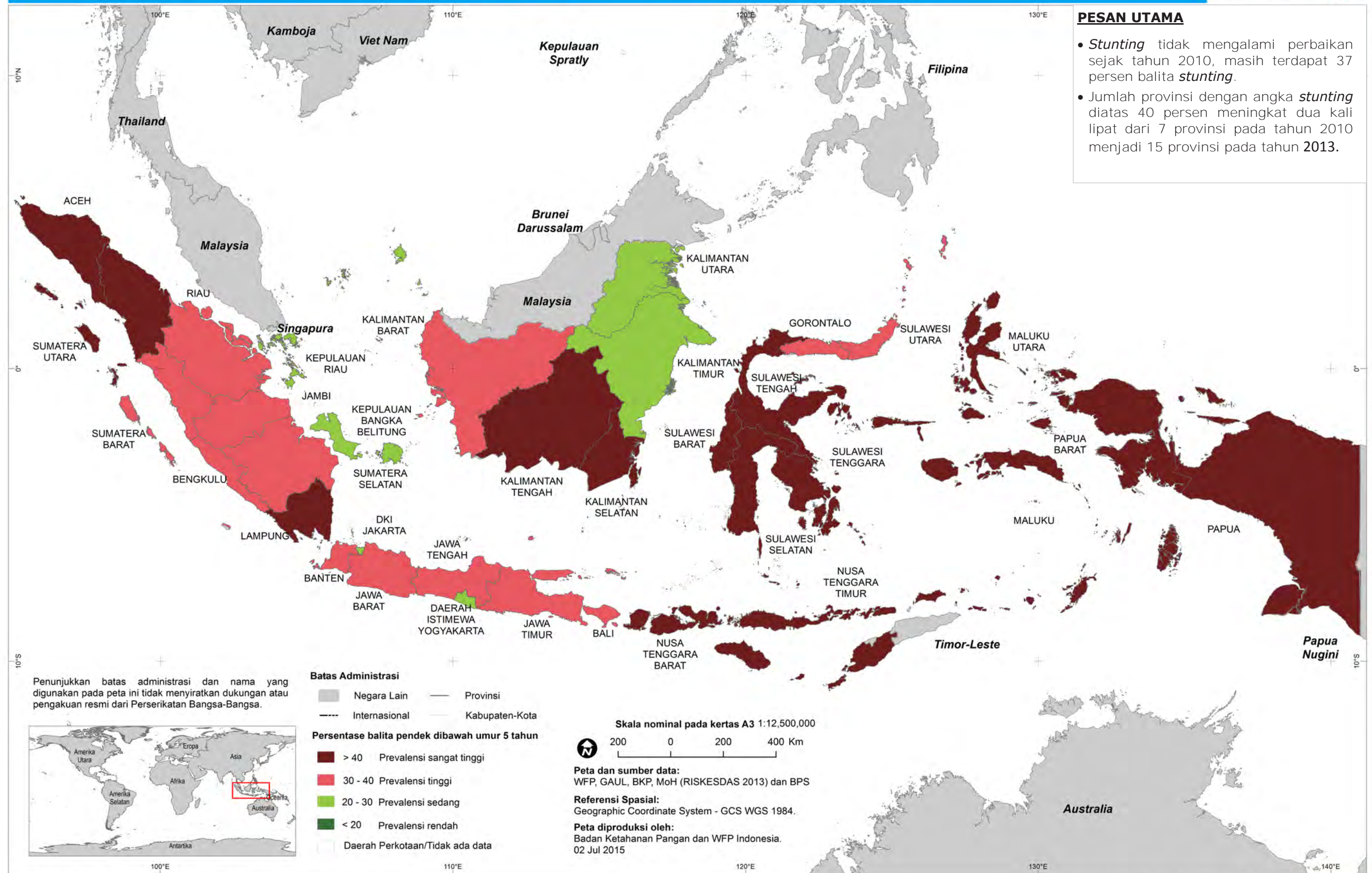


# Prevalensi dari anak di bawah 5 tahun yang memiliki tinggi badan kurang



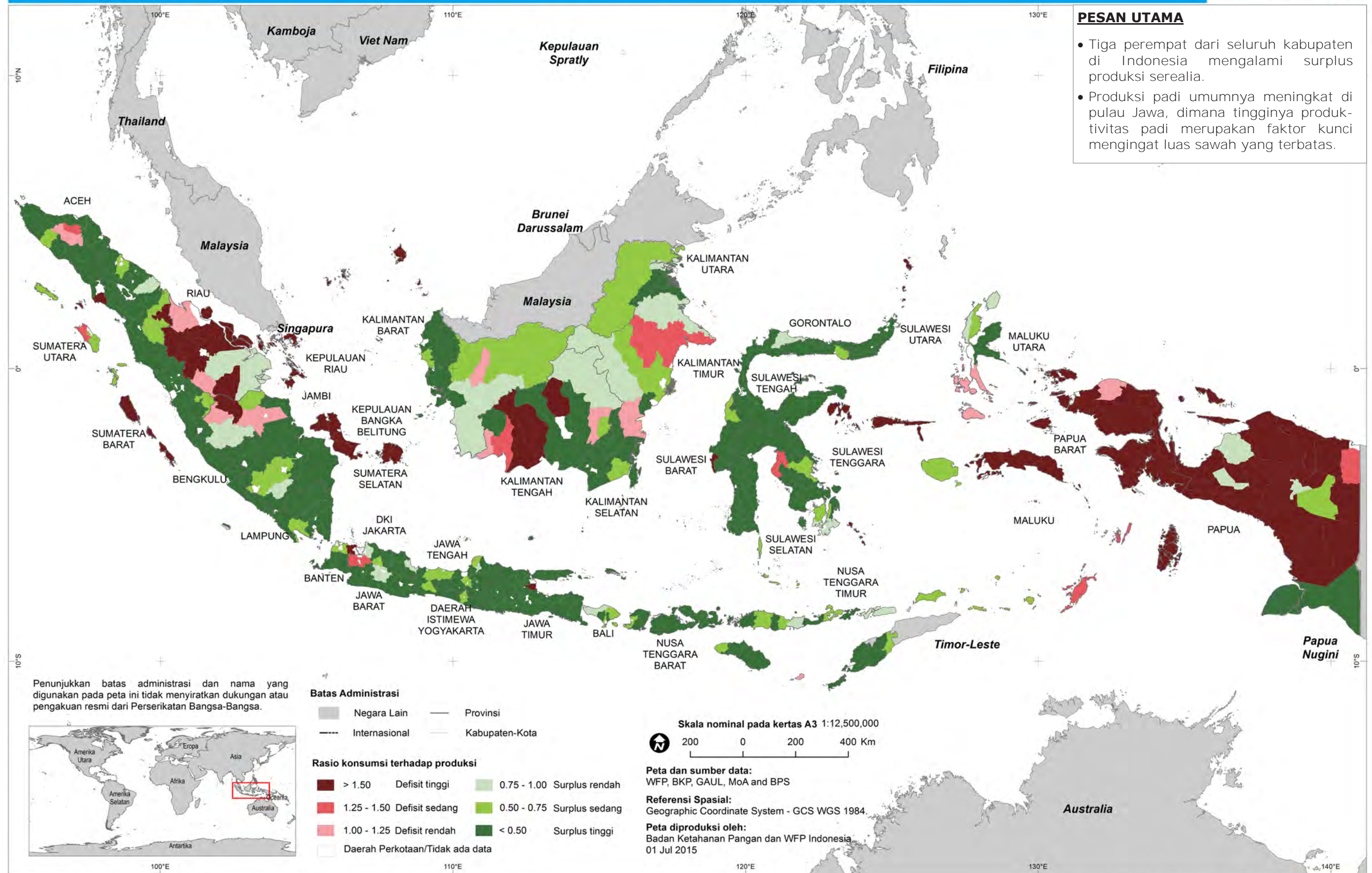
## PESAN UTAMA

- *Stunting* tidak mengalami perbaikan sejak tahun 2010, masih terdapat 37 persen balita *stunting*.
- Jumlah provinsi dengan angka *stunting* diatas 40 persen meningkat dua kali lipat dari 7 provinsi pada tahun 2010 menjadi 15 provinsi pada tahun 2013.



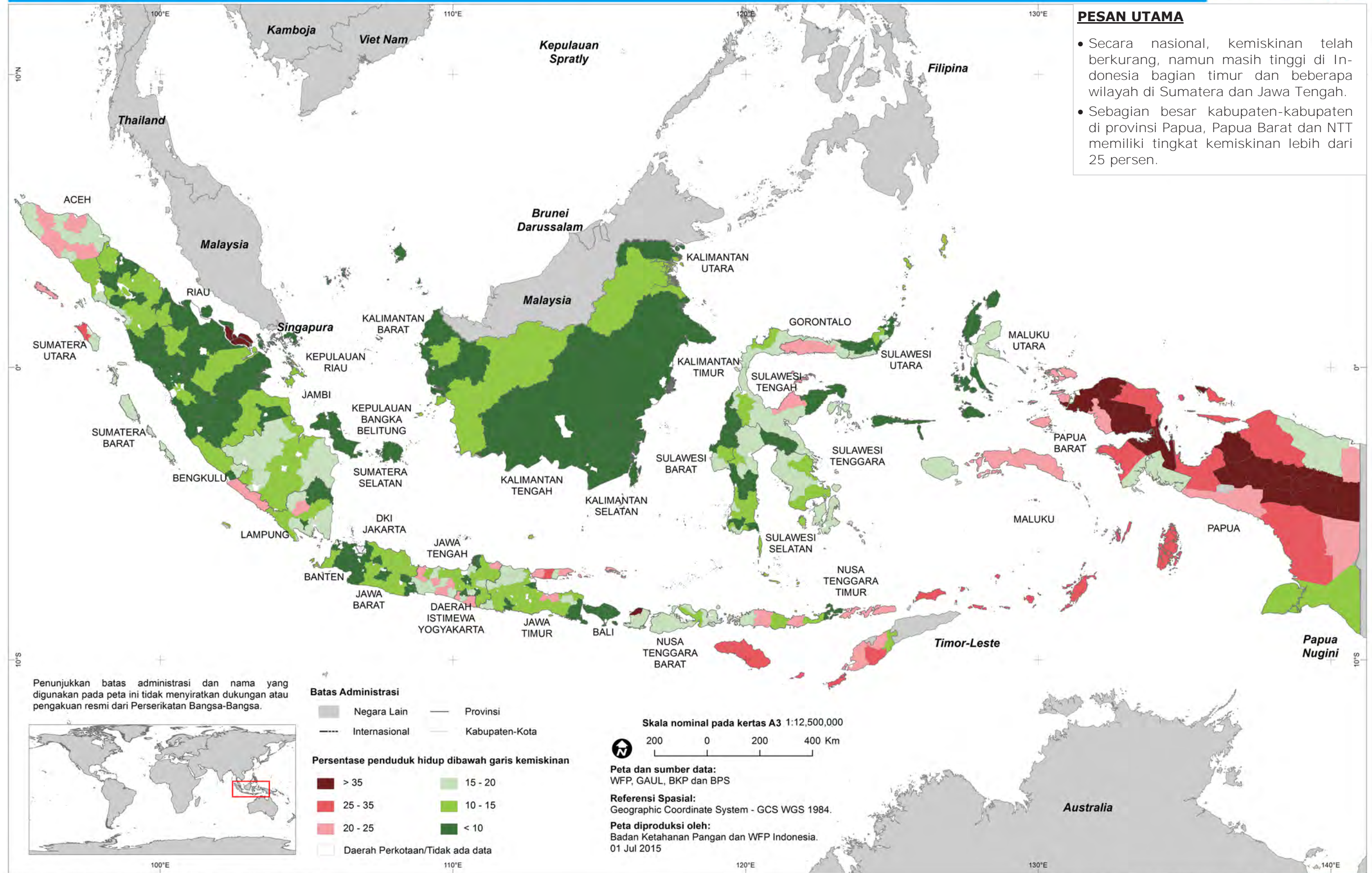


# Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih serelia



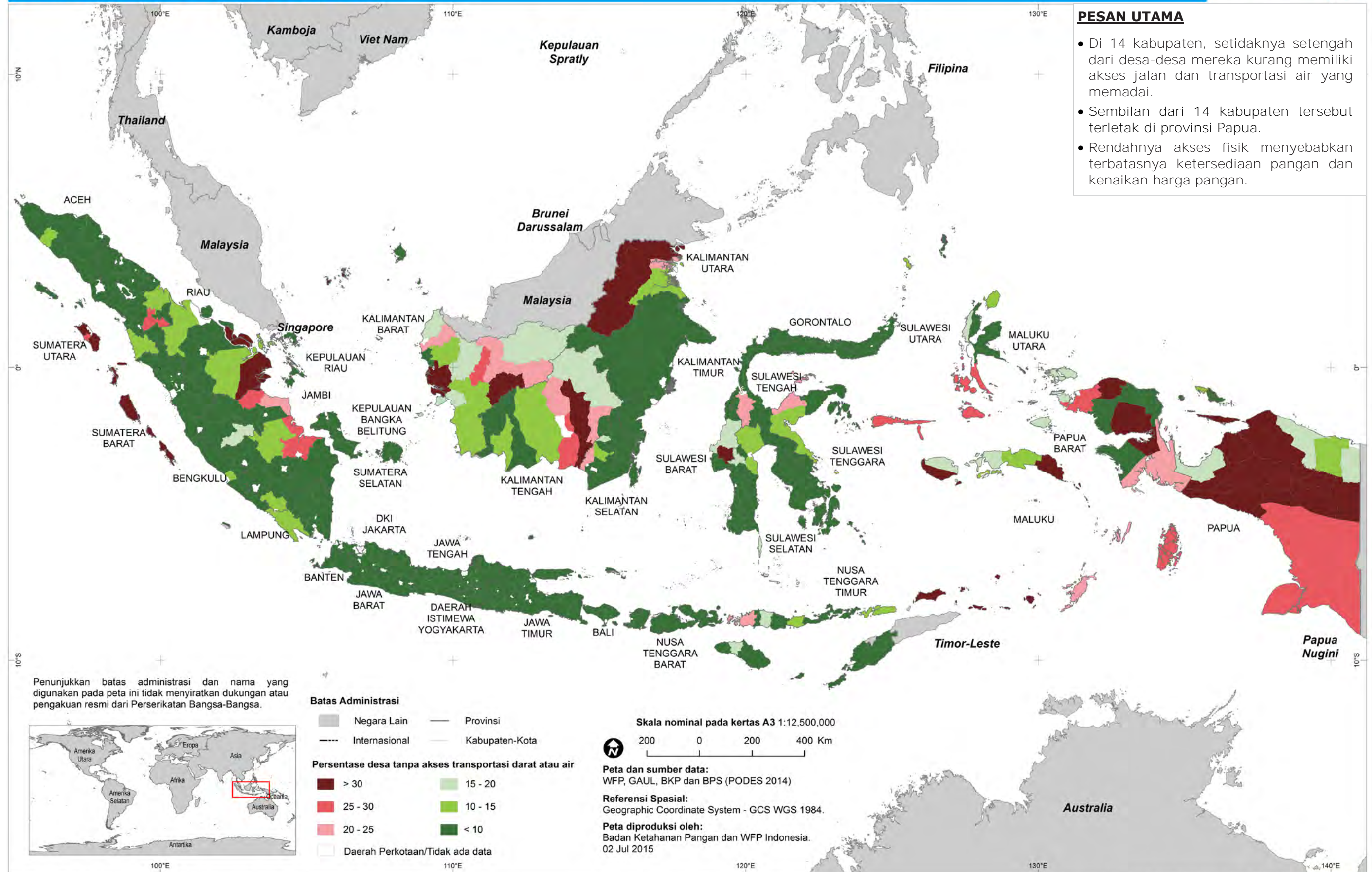


# Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan



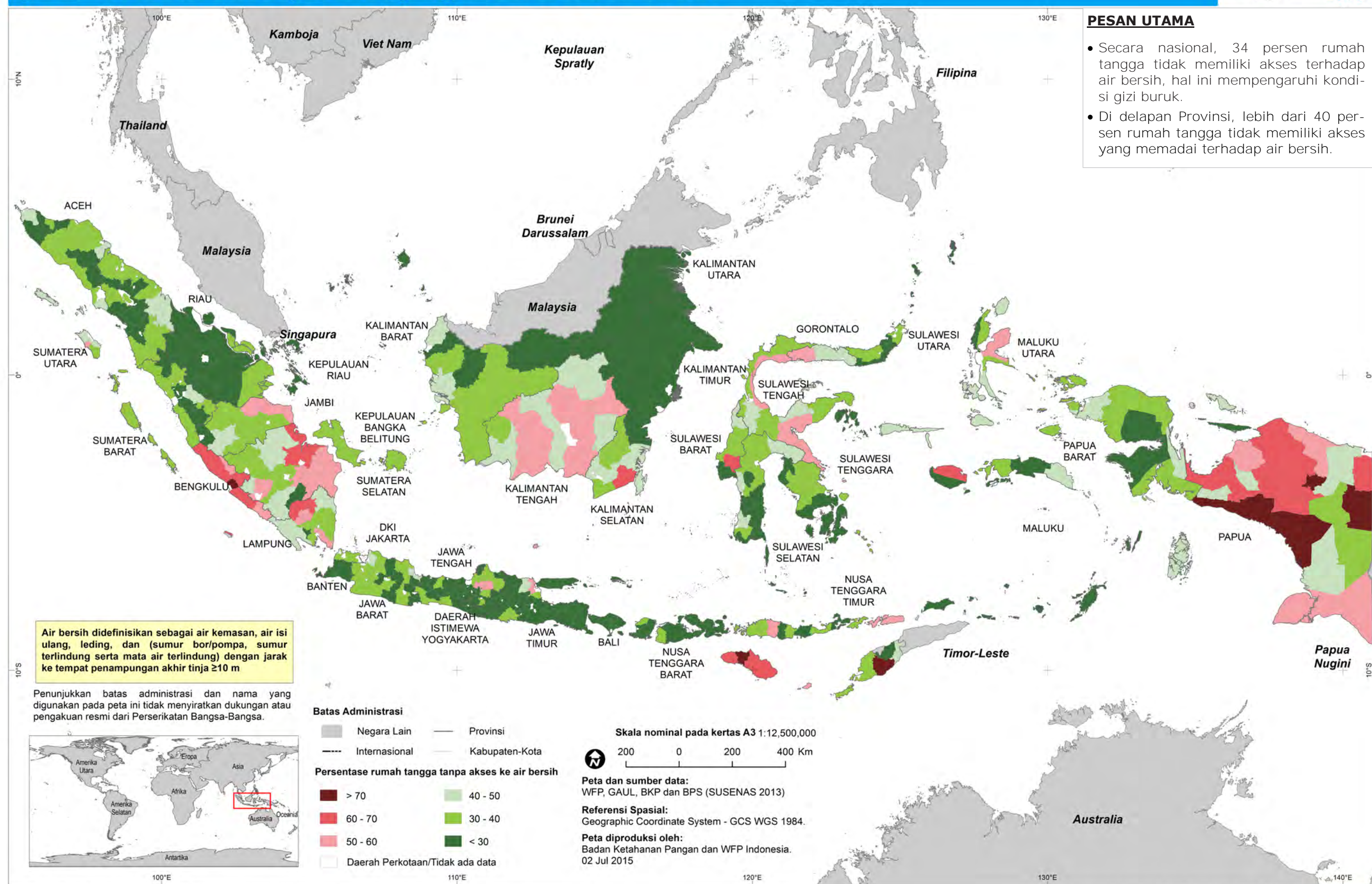


# Desa tanpa jalan penghubung antar desa yang dapat diakses oleh kendaraan roda empat atau tanpa jalur transportasi air





# Rumah tangga tanpa akses ke air bersih dengan mempertimbangkan jarak >10 meter dari septic tank, yang aman untuk air minum

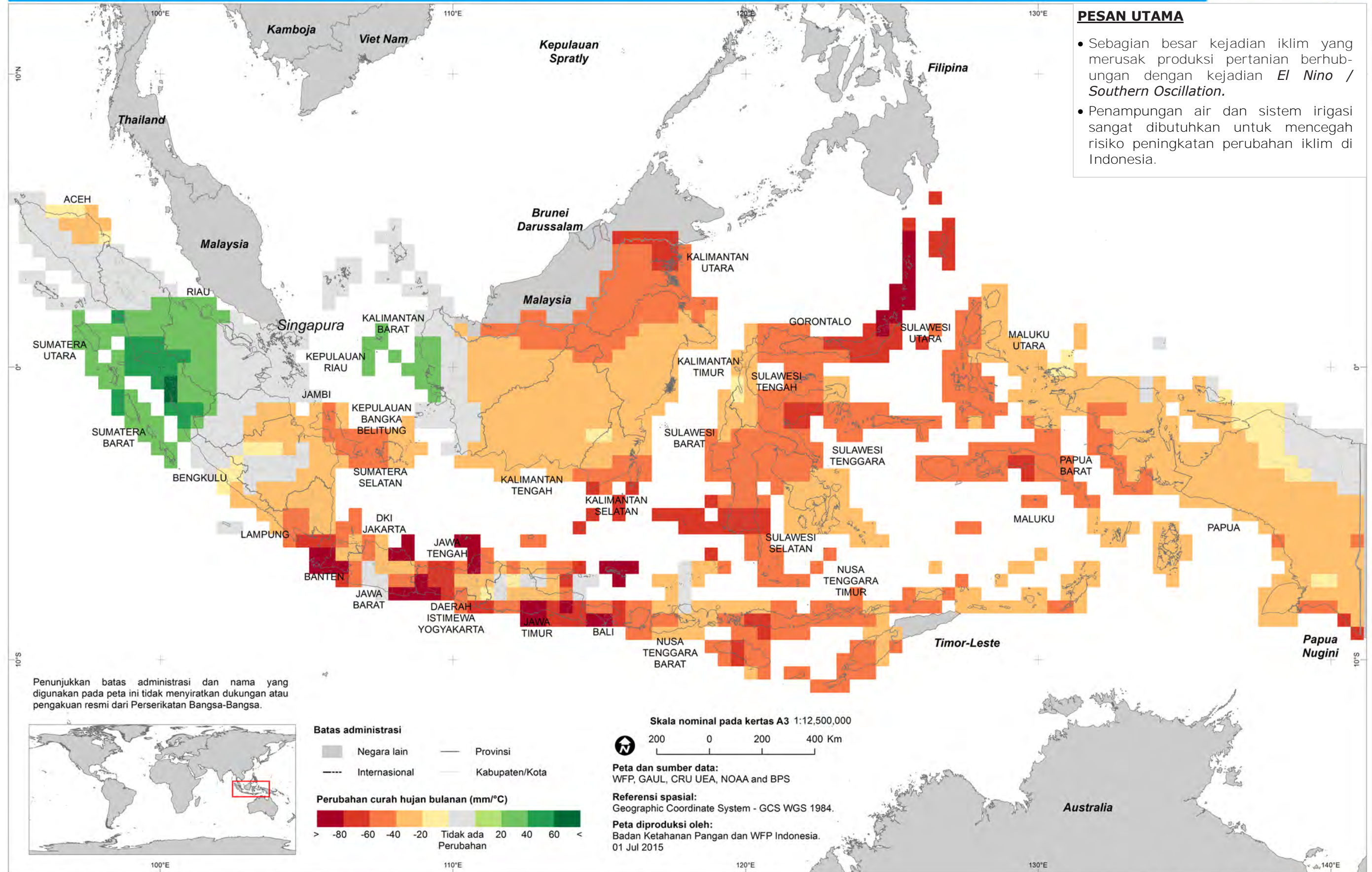


## PESAN UTAMA

- Secara nasional, 34 persen rumah tangga tidak memiliki akses terhadap air bersih, hal ini mempengaruhi kondisi gizi buruk.
- Di delapan Provinsi, lebih dari 40 persen rumah tangga tidak memiliki akses yang memadai terhadap air bersih.



# Perubahan curah hujan bulanan dengan kenaikan 1 derajat pada suhu permukaan laut







<http://bit.ly/FSVA2015>



Dicetak pada: Juni, 2016 Sumber foto: World Food Programme



Pengembangan FSVA ini mendapat dukungan dari Pemerintah Australia

**Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan - BKP**

Kementerian Pertanian

Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan

Jakarta, Indonesia

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Tel. : (62) 21 - 7816652, 7806938

Fax. : (62) 21 - 7816652, 7806938

<http://bkp.pertanian.go.id>



**World Food Programme**

Wisma Keiai, 9 Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 3

Jakarta, Indonesia

Tel. : (62) 21 - 5709004

Fax. : (62) 21 - 5709001

[www.wfp.org](http://www.wfp.org)